

## PERAN ORANG KRISTEN DALAM POLITIK DAN KEPEMIMPINAN NEGARA

**Aripin Tambunan**

### ABSTRAKSI

Peran orang Kristen dalam politik dan kepemimpinan negara di Indonesia tidak dapat terlihat, hal ini dikarenakan ada anggapan dari beberapa orang Kristen yang menganggap bahwa politik itu kotor; sehingga menjauhkan diri dari dunia politik. Ketidak tampakkan peran orang Kristen tersebut, diperparah oleh kegagalan gereja dan sekolah-sekolah tinggi teologi Kristen yang tak mampu memproduksi pemimpin-pemimpin yang memiliki kualitas *man the moral agent* ala Thomas Aquinas atau manusia baru ciptaan Yesus. Kegagalan tersebut berdampak kepada negara Indonesia, Indonesia merupakan negara gagal bila dipandang dari pemikiran Thomas Aquinas. Di mana suatu negara seharusnya sebagai suatu sistem tukar menukar pelayanan demi mencapai kebahagiaan dan kebaikan bersama. Tetapi nyatanya Indonesia dipenuhi korupsi, gagal melindungi orang miskin, dan data pribadi masyarakatnya.

**Frasa Kunci:** Politik, orang Kristen, negara, kepemimpinan, gereja, *man the moral agent*, dan manusia baru.

### PENDAHULUAN

Ketika kekristenan membicarakan politik, maka akan muncul asumsi dan pertanyaan sebagai berikut kepermukaan. Pertama, politik itu kotor, sehingga tidak patut orang Kristen terlibat dalam politik; kedua, bolehkah orang Kristen berpolitik? Ketiga, Bagaimana peran orang Kristen dalam perpolitikan bangsa? Oleh karena itu, baiklah terlebih dahulu dibahas, apa itu politik?

Kata *polis* merupakan titik berangkat dari pengertian politik, yang artinya kota. *Polis* atau *the greek city* merupakan kota yang dikelilingi oleh benteng yang pusat pemerintahannya terletak di atas bukit. Dari kata *polis* ini kemudian membentuk istilah-istilah lain yang menjelaskan tentang negara dan politik seperti, *politea* (segala yang menyangkut negara), *politikus*

(ahli negara), *politieke techne* (kemahiran politik), *politieke episteme* (ilmu politik).

Pada bangsa Romawi istilah politik dikenal dengan kata *ars politica*, artinya pengetahuan tentang negara atau kemahiran tentang masalah-masalah negara. Di Jerman, ilmu politik meliputi mempelajari negara sebagai gejala hukum, tafsiran juridis UUD dan hukum administratif. Di Inggris dan Amerika ilmu politik adalah mempelajari soal kekuasaan dan masyarakat.<sup>1</sup>

Plato dan Aristoteles memandang politik sebagai institusi rasional dan organik yang ditegakkan atas dasar hukum dan keadilan dan dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup> Thomas Aquinas mengatakan bahwa politik itu meliputi, hukum alam, negara dan kekuasaan. Di mana hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional dalam hukum abadi (*eternal Law*). Dan sebagai makhluk rasional, manusia tergantung dengan manusia yang lain. Artinya untuk mengembangkan akal budi dan pemikirannya, maka manusia memerlukan komunitas politik (negara). Sementara kekuasaan datangnya dari Tuhan sebab Tuhan-lah penguasa alam semesta. Jadi jika seorang raja diberikan kekuasaan untuk memerintah, maka itu merupakan anugerah dari Tuhan.<sup>3</sup>

Jadi, apakah politik itu? Maka dari uraian di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa politik adalah melingkupi soal masyarakat, kekuasaan, negara, dan permasalahan-permasalahannya.

## Masyarakat

Siapakah yang dimaksud masyarakat? Rousseau mengemukakan bahwa masyarakat adalah kesatuan yang dibentuk individu-individu, individu-individu tersebut membentuk kesatuan melalui perjanjian masyarakat. Kesatuan masyarakat tersebut membentuk pendapat umum yang dianggap sebagai cerminan kemauan dan kehendak umum yaitu masyarakat. Itulah sebabnya menurut Rousseau bahwa suatu yang esensial

---

<sup>1</sup> Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, (Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2006), 16.

<sup>2</sup> Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 125.

<sup>3</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia, 2001), 90-107.

jika kehendak umum mampu mengekspresikan dirinya, sehingga tidak akan ada masyarakat parsial di dalam bangunan negara.<sup>4</sup>

*Webster's Encyclopedic Dictionary*, mendefinisikan masyarakat atau *Society* sebagai *The system of community life, in which individuals, ordinarily in a territorial establishment, form a continuous and regulatory association for their mutual benefit and protection.*<sup>5</sup> (Sistem hidup berkomunitas, di mana individu, biasanya di suatu wilayah yang ditetapkan, membentuk suatu aturan asosiasi dan berkelanjutan untuk manfaat dan perlindungan mereka yang timbal balik).

Dari dua definisi di atas dapat diambil kesamaan yaitu, Rousseau mengatakan masyarakat adalah kesatuan yang dibentuk individu-individu (ini juga berbicara tentang sistem), dan Webster's mendefinisikan sebagai sistem hidup berkomunitas. Berarti masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sistem. Sistem yang dibuat oleh sekelompok manusia untuk kebaikan dan kebahagiaan bersama.

Sistem yang baik harus datang dari manusia yang baik pula, menurut Thomas Aquinas manusia yang baik berjenis *man the moral Agent*. Jenis manusia yang cinta kebenaran, kebaikan, keadilan, untuk dilakukan terhadap sesama manusia maupun terhadap alam. Dua jenis manusia lainnya tidaklah baik yaitu, jenis *man the substance*, yaitu jenis manusia yang mempunyai tabiat untuk berbahagia dengan memiliki segala sesuatu. Dan jenis *man the animal*, manusia memiliki kecenderungan hewani.

Jika demikian, maka seharusnya *man the moral Agent* harus lebih banyak dimasyarakat agar tercipta sistem masyarakat yang baik. Orang Kristen seharusnya dapat memenuhi hal tersebut, sebab orang Kristen yang sudah lahir baru atau yang mengalami ciptaan ulang harusnya berjenis *man the moral Agent*.

### **Kekuasaan/ Pemerintahan**

Siapakah pemegang kekuasaan? Sebagaimana yang dikutip oleh Pakpahan dari Utrecht,<sup>6</sup> memberikan tiga pengertian tentang pemerintah bila ditinjau dari segi tanggungjawab. Pertama, dalam pengertian yang lebih

---

<sup>4</sup> Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, (Jakarta: Visi Media, 2007), 48.

<sup>5</sup> Hlm. 915.

<sup>6</sup> *Muchtar Pakpahan, Ilmu Negara dan Politik*, (Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2006), 6.

luas. Pemerintah adalah, keseluruhan badan-badan kenegaraan yang bertugas menjalankan kekuasaan negara, termasuk di dalamnya badan yang membuat undang-undang, badan yang menjalankan undang-undang, dan pelaksana undang-undang. Kedua, dalam pengertian yang sempit. Pemerintah adalah seluruh aparat yang bertugas melaksanakan pemerintahan sehari-hari (eksekutif). Ketiga, dalam pengertian yang lebih sempit. Pemerintah adalah penanggungjawab tertinggi dari pelaksana pemerintahan sehari-hari.

Jadi untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat, maka yang menjalankan kekuasaan adalah pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Dan kekuasaan berkaitan dengan kedaulatan memiliki 4 teori, yaitu: 1) teori kedaulatan Tuhan; 2) teori kedaulatan hukum; 3) teori kedaulatan negara; 4) teori kedaulatan rakyat.

Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan yang menjalankan kekuasaan hendaklah dipimpin oleh seorang yang bijaksana, mengapa? Agar keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan/dikeluarkannya menjadi keputusan dan ketetapan yang bijak. Menurut Plato, seorang raja hendaklah seorang filsuf, sebab menurut pendapatnya, filsuflah yang dapat menjadi bijak atau seorang filsuf mencintai kebijaksanaan. Jadi jika seorang bijaksana dipadukan dengan seorang yang memegang kekuasaan, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik.

Tetapi akan lebih sempurna lagi dari apa yang dikatakan Plato, jika seorang raja (pemimpin negara) adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bijaksana, orang yang mencintai kebenaran (seperti prinsip Yesus di atas), pembawa damai, dan orang yang memiliki integritas.

Berkaitan dengan kepemimpinan ini, telah banyak dikeluarkan teori-teori kepemimpinan, di mulai pada tahun 1834, Foublanque memperkenalkan kata kepemimpinan untuk pertama kalinya. Pada awalnya kata kepemimpinan bermakna kepala yang datang dari kata *captain*, *capital*, *headman*, yang diturunkan dari Latin, yaitu *Caput*, yang berarti kepala. Di dalam kosa kata Yunani kata kepemimpinan dapat dilihat dari gagasan kata *agogos*, dari kata kerja *agein* yang diterjemahkan *to lead*. Di mana makna pertama kata tersebut adalah, kepemimpinan posisional dan makna keduanya adalah, kemampuan seseorang untuk memimpin. Tetapi pada

tahun 1930 kata kepemimpinan telah mendapat makna baru yaitu kepemimpinan adalah pengaruh.<sup>7</sup>

Mulai tahun 1930 tersebut, teori-teori tentang kepemimpinan semakin maju, itulah sebabnya ada enam pandangan tentang kepemimpinan yang muncul kemudian yakni, kepemimpinan tradisional, kepemimpinan pribadi, kepemimpinan team, kepemimpinan posisional, kepemimpinan politis, kepemimpinan visioner, kepemimpinan etis.

Sebenarnya jika berkaca kepada kepemimpinan yang dilakukan Yesus, maka kepemimpinan adalah tindakan konkret yang dilakukan seorang pemimpin untuk memenuhi kebutuhan pengikutnya, inilah sebenarnya definisi kepemimpinan. Yesus ketika memimpin tidak memberikan pengaruhnya terlebih dahulu, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat pada waktu itu. Lihat misalnya menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan, mengecam para pemimpin Yahudi yang berlaku lalim. Semua tindakan-Nya ditujukan untuk kesejahteraan para pengikutnya. Tindakan-Nya yang lebih konkret lagi ialah, Ia rela mati bagi pengikut-Nya. Karena tindakan-tindakan-Nya tersebut orang-orang semakin banyak yang datang untuk mengikuti-Nya.

Di Indonesia, dapat dilihat dari apa yang dilakukan Jokowi. Ia memimpin dengan melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi kebutuhan pengikutnya, ia memfokuskan pekerjaannya untuk manfaat bagi masyarakat yang dipimpinnya. Lihat bagaimana ia ketika menjadi Walikota Solo, dan bagaimana ia menyelesaikan kasus tanah Abang di DKI Jakarta.

Jadi dapat dikatakan bahwa pengaruh itu merupakan dampak dari tindakan konkret dari pemimpin, oleh karena itu kepemimpinan bukanlah pengaruh. Tetapi pertama tama adalah tindakan konkret yang dilakukan seorang pemimpin untuk memenuhi kebutuhan orang yang dipimpinnya, sehingga apapun yang ia putuskan dan kerjakan sebagai pemimpin, semuanya untuk kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya.

Jika demikian adanya kepemimpinan, maka sudah seharusnya gereja ataupun sekolah-sekolah tinggi Kristen yang memproduksi pemimpin-pemimpin yang memiliki kualitas seperti yang dikehendaki Yesus. Agar banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh partai-partai politik untuk

---

<sup>7</sup> Robert W. Terry, *Kepemimpinan Autentik*, (Batam: Interaksara, 2002).

memilih pemimpin pada level legislatif (DPR), pada level pemerintah daerah (camat, bupati/ walikota, gubernur), dan pada level setingkat menteri.

### **Negara dan Permasalahan-permasalahannya**

Soenarko mengemukakan bahwa negara adalah, organisasi masyarakat yang mempunyai daerah teritori tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *sovereign*.<sup>8</sup> Wiryono mengemukakan suatu defenisi yang lebih konprehensif, yaitu negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritori) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia.<sup>9</sup> Sementara Thomas Aquinas melihat negara sebagai suatu sistem tukar menukar pelayanan demi mencapai kebahagiaan dan kebaikan bersama.<sup>10</sup>

Karena negara adalah suatu organisasi yang harus memiliki, teritorial, ada satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan bertujuan membahagiakan rakyatnya. Maka sudah barang tentu memiliki berbagai-bagai permasalahan di dalamnya. Misalnya, pengaturan masalah pajak, hak individu, keadilan, hukum, dan kebebasan.

Penyelesaian masalah dari pengaturan masalah pajak, hak individu, keadilan, hukum, dan kebebasan ini haruslah ditangani oleh orang-orang yang memiliki integritas yang baik, jika tidak maka tak heran bila terjadi penyelewengan kekuasaan dan perilaku korupsi yang tak dapat dihapuskan. Jika hal itu terjadi, maka apa yang dikatakan Thomas Aquinas bahwa negara sebagai suatu sistem tukar menukar pelayanan demi mencapai kebahagiaan dan kebaikan bersama mustahil dapat dicapai.

Melalui definisi Thomas Aquinas ini, maka saya mengatakan Indonesia adalah negara gagal, kegagalan Indonesia sebagai negara juga merupakan kegagalan gereja-gereja di Indonesia yang tak mampu memproduksi manusia yang berjenis *man the moral agent* atau manusia baru seperti gagasan Yesus dalam Efesus 4: 24. Gereja telah terjebak dalam ajaran *soma* (tubuh) *sema* (jiwa) Plato, yang mengajarkan tubuh itu jahat dan jiwa itu baik, yang

---

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Alumni, 1981), 9

<sup>9</sup> Wiryono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1980), 2.

<sup>10</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia, 2001), 95.

mengejawantah di dalam perilaku pembedaan antara sakral dan profan, pemisahan antara gereja dan politik. Gereja harus bertobat dari ajaran yang seperti ini, kembali kepada ajaran Yesus.

Kegagalan Indonesia sebagai negara juga merupakan kegagalan sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia, yang tak mampu memproduksi lulusannya menjadi seorang pemimpin yang berjenis *man the moral agent* atau manusia baru yang berkhiprah ditengah-tengah negara, bukan hanya di tengah-tengah gereja. Sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia, harus merubah kurikulum dan pembinaan pada Mahasiswanya agar memiliki pengertian pelayanan yang holistik bukan dualistik profan dan sakral.

Kegagalan Indonesia sebagai negara dapat dilihat dari beberapa kasus di bawah ini: Menurut kabar24.com, Indonesia memiliki hutang sebesar Rp341,7 triliun untuk tahun 2013. Jumlah hutang ini adalah yang terbesar dalam sejarah Indonesia.<sup>11</sup> Bahkan 20 % dari APBN telah dibiayai dari hutang.

Bank Pembangunan Asia (ADB) menurunkan angka proyeksi pertumbuhan *product domestic bruto* (PDB) Indonesia tahun 2013 dari 6,4 persen yang diprediski pada bulan April 2013 menjadi 5,7 persen. Prediksi pada tahun 2014 6,6 persen menjadi 6,0 persen. Proyeksi tersebut di dasarkan pada analisis melemahnya pertumbuhan kinerja ekspor, nilai tukar rupiah, investasi swasta, dan penurunan harga komoditas yang terjadi sejak 2012.<sup>12</sup>

Negara belum melindungi data pribadi nasabah (bocornya data pribadi ke pihak lain, hal ini menunjukkan sistem perbankan yang tidak baik), hal ini terindikasi dari penawaran produk dari penjual yang mengetahui nama dan nomor selular seseorang. Pada hal ia tidak pernah berhubungan dengan penjual tersebut.

Banyaknya konflik Pemilihan Kepala Daerah yang terjadi di Indonesia hingga tahun 2013 yang menunjukkan atau berindikasi tidak berlakunya sistem Pemilihan Kepala Daerah dengan baik. Jumlah konflik tersebut

---

<sup>11</sup> <http://www.kabar24.com/nasional/read/20130604/66/191554/hutang-indonesia-2013-terbesar-sepanjang-sejarah-mencapai-rp3417-triliun>, akses tgl 7 Mei 2014.

<sup>12</sup> Kompas, *Buku Pintar Kompas 2013*, (Jakarta: Kompas, 2014), hal. 318.

dapat terlihat dari adanya 719 perkara, di mana jumlah putusan 685 dan terdapat 34 sisa perkara yang belum terselesaikan.<sup>13</sup>

Korupsi di Indonesia merajalela seperti sebahagian kecil yang dapat dicatat di bawah ini:

1. Ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum ditetapkan KPK pada tanggal 22 Pebruari 2013 sebagai tersangka kasus proyek Hambalang
2. KPK menangkap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini di rumah dinas di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2014.
3. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ditangkap KPK terkait kasus dugaan suap sengketa pemilu kepala daerah (Pilkada) Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan sengketa Pilkada Lebak, Banten, pada tanggal 2 Oktober 2014.
4. Rapat Paripurna DPR pada tanggal 19 Desember 2013 memutuskan memperpanjang masa kerja Timwas DPR untuk penuntasan kasus bank Century hingga 30 September 2014.
5. Sejumlah kasus mafia pajak mulai dari: Gayus HP Tambunan (mantan pegawai Ditjen Pajak) divonis 7 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan 19 Januari 2011. Bahasyim Assifie (Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII) divonis 10 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan tanggal 3 Februari 2011. Dhana Widyatmika (Pegawai Direktorat Jenderal Pajak) di vonis 7 Tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta tanggal 9 Nopember 2012. Tommy Hindratno (Mantan kepala seksi pengawasan dan konsultasi kantor pelayanan pajak Pratama Sidoarjo) di vonis 3,5 tahun oleh pengadilan Tipikor Jakarta.<sup>14</sup>

Pembangunan kota yang tidak teratur (tidak mengikuti tata kota) telah merusak keseimbangan alam, pinggiran sungai atau kali yang ada di kota telah dijadikan tempat tinggal. Bahkan di beberapa kota, ada bangunan rumah yang dibangun persis di atas aliran kali. Pada waktu musim kemarau rumah-rumah tersebut tidak tampak sebagai persoalan, namun ketika musim hujan tiba di mana debit air bertambah maka akan muncul

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 442.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 117.

persoalan. Air tidak dapat ditampung oleh alur sungai atau kali, sehingga air mengalir ke arah lain yang lebih rendah.

Para pengembang perumahan yang terus bertumbuh dan melakukan pembangunan perumahan seiring meningkatnya jumlah penduduk kota, dan pembangunan pusat-pusat pembelanjaan, toko, perkantoran yang terus bertambah tidak lagi memperhatikan keseimbangan alam. Di kota telah terjadi “pohon beton” lebih banyak daripada pepohonan. Konsekuensinya, resapan air menjadi sangat sedikit, sehingga air meluap ke permukaan.

Pengaruh kebiasaan buruk dari masyarakat kota yang membuang sampah sembarangan, turut memperparah keadaan tersebut, akibatnya kali tersumbat sampah. Air mengalir tidak lagi mengikuti alur kali, tetapi membuka alur baru dengan memilih jalannya sendiri dengan menyusuri permukaan-permukaan yang rendah di bagian-bagian kota.

Belum lagi pencemaran limbah domestik yang seringkali kurang dipermasalahkan ataupun ditonjolkan ke permukaan, padahal sebenarnya dapat menjadikan penderitaan dan kematian manusia yang tidak sedikit. Pencemaran limbah domestik ini berupa tercemarnya tanah, air, dan bahan makanan oleh tinja yang mengakibatkan terjadinya penyakit muntaber di beberapa daerah yang mengalami pencemaran kotoran manusia.

Lalulintas yang tidak beraturan, pengendara yang tidak tertib di jalan raya, seolah-olah tidak ada hukum lalu lintas, dan permasalahan ini tidak pernah dapat diatasi. Pada hal semrautnya lalulintas dapat menggambarkan semrautnya suatu negara, tertibnya lalu lintas dapat mencerminkan tertibnya suatu negara. Bila dalam hidup sehari hari di jalan raya semrawut/tidak tertib, maka itu akan menjadi kebiasaan untuk tidak tertib dalam hidup pemerintahan. Tetapi jika sehari harinya tertib di jalan raya, maka kehidupan bernegara pun akan dapat tertib, sebab masyarakat tidak menyukai ketidaktertiban lagi.

Kegagalan pemerintah dalam melindungi hak warganya yang ada dalam kemiskinan, sehingga harus ada yang meninggal karena ditolak pihak rumah sakit dengan berbagai alasan, seperti kasus Dera Nur Anggraeni bayi yang lahir prematur dari pasangan Eliyas Setyia Nugroho dan Lisa Darawati.

Bila dilihat dari pembahasan di atas, maka politik itu tidak kotor. Sebab tujuan dari politik seharusnya adalah sama dengan tujuan negara, yaitu untuk mencapai kebahagiaan bersama dari setiap individu atau masyarakat yang ada di dalamnya. Lalu mengapa politik itu sering dianggap kotor? Barangkali pemikiran Thomas Aquinas tentang tiga kategori manusia dapat menolong untuk menjelaskannya. Ketika kategori manusia, *man the animal* yang memimpin manusia itu, maka ia dapat mengejawantahkan perilaku hewan di dalam perilakunya sehari-hari yakni, kejam dan tamak terhadap sesamanya. Maka mulailah politik itu menjadi kotor dan bahkan dapat seperti yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, *homo homini lupus*- manusia menjadi serigala bagi sesamanya.

Jadi kekotoran politik, bukanlah karena politik itu kotor, tetapi karena individunya yang berlaku menjadi *man the animal*. Sebab itu, Thomas Aquinas mengharapkan agar yang memimpin manusia adalah kategori *man the moral Agent*. Karena hanya *man the moral agent*-lah yang dapat meredakan kedua kategori manusia yang lain, yaitu, *man the substance* dan *man the animal*.

Bila individunya yang menjadi kotor, maka perlu kiranya setiap orang dimurnikan kembali dengan kembali kepada Tuhan. Kekristenan mengajarkan bahwa, manusia disucikan oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang dapat mengarahkan setiap individu menjadi benar dalam segala aspek hidupnya. Efesus 4: 24, juga mengutarakan bahwa manusia yang dicipta ulang oleh Kristus akan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.

Apalagi menurut Piliang, ada tiga isu sentral politik di dalam abad informasi dewasa ini adalah:<sup>15</sup> Pertama, geopolitik, yaitu terjadinya perubahan mendasar tentang fungsi wilayah atau teritorial, khususnya bagaimana politik dipandang di dalam dunia yang tanpa sekat dan di dalam era transparansi yang diciptakan oleh abad informasi dan globalisasi.

Kedua, politik ruang (*spatio politics*) atau ruang publik (*public sphere*). Berbagai aktivitas politik, seperti misalnya, pertemuan, debat, kampanye, komunikasi politik, telah dilakukan di dalam ruang-ruang virtual melalui komputer.

---

<sup>15</sup> Yasraf A. Piliang, *Transpolitika*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), hal. 2-3.

Ketiga, Persoalan politik waktu (*chrono politics*). Aktivitas politik berada pada kekuasaan atas kecepatan. Artinya, barangsiapa yang tidak mampu mengatasi kecepatan di dalam abad informasi ini (kecepatan informasi, kecepatan intelijen, kecepatan senjata), maka sesungguhnya ia tidak mempunyai kekuasaan

Jika demikian isu sentral politik pada zaman informasi ini, maka seharusnya orang-orang Kristen banyak terlibat di dalam kancah perpolitikan bangsa. Agar *man the animal* dan *man the substance* dapat ditekan atau dikurangi pengaruhnya di dalam perpolitikan bangsa. Dan memunculkan *man the moral agent* yang diwarisi dari kekristenan.

## PEMIKIRAN POLITIK DAN SOSIAL KRISTEN AWAL

### Yesus dan Pemikiran Politik Kristen Awal

Pada waktu Yesus lahir, bangsa Israel memiliki struktur sosial dan kelas-kelas sosial yang dapat terlihat pada tiga kelas yaitu: Saduki, Farisi, dan *Am Ha-aretz*. Saduki merupakan kumpulan orang-orang kaya dan dapat diklasifikasi sebagai kelas sosial atas. Farisi merupakan kumpulan dari orang-orang urban dan revolusioner, yang dapat diklasifikasikan sebagai kelas menengah. *Am Ha-aretz* atau dikenal juga sebagai kaum *Essena*, mereka acapkali mendapat tekanan atau penindasan baik dari kaum sebangsa maupun dari kekaisaran Romawi. Barangkali hal itu disebabkan karena mereka merupakan kumpulan para petani dan buruh-buruh kasar, namun Yesus mendapat dukungan penuh dari kaum *Am Ha-aretz* ini.<sup>16</sup>

Pada waktu Yesus hidup, perlawanan terhadap imperium Romawi sering dilakukan dengan berbagai aksi-aksi protes sosial dan pemberontakan. Biasanya pengorganisasian perlawanan itu berpusat di kota Galilea, itu sebabnya kota tersebut merupakan kota pembantaian terhadap orang-orang Yahudi yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi.

Kejahatan-kejahatan imperium Romawi yang ditentang oleh orang-orang Yahudi adalah, memperlakukan sistem pajak yang menyengsarakan rakyat, meletakkan patung kaisar di Bait suci Jerusalem untuk diper-Tuhan-

---

<sup>16</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Gramedia, 2001), 51.

kan oleh orang-orang Yahudi.<sup>17</sup> Akibatnya, perlawanan politik terhadap imperium Romawi semakin gencar, bukan saja melalui kekerasan melalui radikalisasi kelas *Am Ha-arets*. Tetapi juga melalui gerakan-gerakan spiritual dengan khotbah-khotbah yang bertema kasih terhadap sesama yang dikembangkan oleh Yohanes pembaptis dan Yesus, sehingga tidak adanya pemikiran politik Kristen yang sistematis pada masa awal kekristenan yang dapat menimbulkan masyarakat madani (*civil society*), bukanlah merupakan suatu argumentasi bahwa kekristenan tidak terlibat dalam politik.

Sebab meskipun demikian, masih dapat dilihat prinsip-prinsip politik yang dikembangkan Yesus<sup>18</sup> melalui pengajaran-pengajaran dan perumpamaan-perumpamaan yang diutarakan-Nya, seperti: prinsip pembawa damai. Yesus mengerti bahwa bangsa Israel ada dalam penjajahan imperium Romawi, tetapi Ia tidak mengadakan perlawanan atau mengorganisasi perlawanan secara fisik. Ia justru memberikan pengajaran tentang pembawa damai seperti pada Matius 5: 9 “berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah”, artinya jika semua orang dapat menjadi pembawa damai, maka tidak ada penjajahan, tidak ada perang, yang ada kedamaian. Bahkan cara mempraktikkan bagaimana membawa damai itu Ia ajarkan dengan berkata “kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu” Matius 5: 44. Bukan hanya itu, Ia justru memberikan teladan ketika Ia dianiaya dan tersalib di kayu salib, Ia berkata, “ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat” Lukas 23: 34.

Prinsip yang kedua, adalah hidup dalam kebenaran. Pada pengajaran-Nya tentang kebenaran selalu bersangkut paut dengan terang, seperti pada Yohanes 3: 21 “tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah” tetapi “barangsiapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak.” Di sini dapat terlihat bahwa kebenaran identik dengan perilaku hidup di dalam terang dan kejahatan identik dengan perilaku hidup jahat.

Dengan prinsip tersebut, Yesus telah melakukan perlawanan bukan saja terhadap imperium Romawi tetapi juga terhadap kaum sebangsa-Nya

---

<sup>17</sup> Hal tersebut terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Caligula (37-41AD). Lihat Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (2001), 51-55.

<sup>18</sup> Alan Cstorkey, *Jesus and Politics: Conforting The Powers*, (Grand Rapids: Baker Academic, 2005), p. 141-169.

yang melakukan kekerasan dan penindasan, namun perlawanan tersebut dilakukan dengan prinsip damai.

Prinsip ketiga, prinsip yang lebih mengutamakan integritas daripada popularitas. Ketika Yesus telah banyak melakukan tanda-tanda dan mujizat, dan banyak orang menjadi percaya, Ia tidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka (Yohanes 2: 24); bahkan Yesus menghindarkan diri dari orang-orang yang ingin memaksa-Nya menjadi raja (Yoh 6: 15). Yesus selalu melakukan perbuatan-Nya yang taat kepada Allah (integritas) daripada menerima pujian (popularitas), dengan demikian Ia terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan.

Prinsip-prinsip politik Yesus inilah yang seharusnya juga ada di dalam orang-orang Kristen ketika mereka ada di dalam kancah perpolitikan bangsa Indonesia, Prinsip-prinsip politik yang demikian seharusnya diproduksi oleh gereja dan sekolah-sekolah tinggi teologi Kristen. Agar orang Kristen dapat berperan dengan baik (sesuai dengan teladan Yesus di atas) dalam bernegara dan berpolitik di Indonesia.

### **Sikap Kristen Terhadap Otoritas Politik**

Paulus menjelaskan dalam Roma 13:1-8:

Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.

Penjelasan Paulus di atas, menjelaskan bahwa hukum sipil harus ditaati oleh orang Kristen, bukan hanya karena pemerintah mempunyai kekuatan dan kuasa untuk melakukan pemaksaan, tetapi lebih dari itu, karena pemerintah mendapat legitimasi dari Allah. Karena itu, maka orang Kristen seharusnya mentaati pemerintah bukan karena takut, tetapi karena kesadaran akan perintah Allah.

Mengapa kepatuhan pada pemerintah itu begitu penting? Sebab dari apa yang dijelaskan Paulus di atas, dapat terlihat bahwa tujuan pemerintahan sipil adalah menekan kejahatan dan membangun serta meningkatkan kebaikan. Dengan demikian, maka pemerintah patut mendapat dukungan kesetiaan umat Kristen. Dukungan tersebut berupa, doa syafaat dan ucapan syukur untuk presiden dan untuk semua menteri, gubernur, walikota/ bupati, dan camat) agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan (1 Tim. 2: 1-2).

Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa wilayah agama dan social adalah bagian dan paket dari institusi manusia yang sama dan tunduk pada kekuasaan yang sama, yaitu kekuasaan negara.<sup>19</sup> Tetapi orang-orang Kristen menolak yuridiksi eksklusif ini, mereka meminta keterpisahan agama dan negara. Hal ini dapat terlihat dari pertanyaan yang dilontarkan kepada Yesus, untuk menjebaknya dengan berkata, "bolehkah membayar pajak kepada kaisar?" Yesus memberikan jalan pemecahan yang sangat konkret dan benar, yaitu: Matius 22:21 Jawab mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah."

Rasul Paulus juga mengajarkan hal yang sama, yaitu: Roma 13:7 Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Dengan demikian pengajaran Yesus dan Paulus di atas mengindikasikan bahwa, orang Kristen harus tetap tunduk di bawah pemerintah, dan bekerjasama dengan pemerintah untuk kemuliaan dan hormat bagi Allah.

Martin Luther, juga berpendapat bahwa, baik pendeta atau orang awam, sebagai individu, tunduk pada yuridiksi penuh negara dalam semua masalah yang tidak hanya terbatas pada masalah agama dan spiritual, karena kekuasaan sekuler ditentukan oleh Tuhan untuk menghukum pelaku kejahatan dan melindungi mereka yang mematuhi hukum, kita harus membiarkan mereka bebas melakukan pekerjaan mereka di negara-negara

---

<sup>19</sup> Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal.148.

Kristen dan tanpa pilih kasih, apakah bagi paus, pendeta, pastur, biarawan, atau orang lain.<sup>20</sup>

Jhon Calvin, sedikit berbeda dengan Luther, ia mengatakan bahwa, pada kekuasaan tiran pun orang Kristen wajib tunduk. Tetapi ketundukan di sana adalah tunduk karena kekuasaannya dan bukan karena pribadinya. Dan sebaliknya, hakim-hakim yang lebih rendah dibenarkan untuk melawan kekuasaan tiran (hak penentangan ini hanya berlaku pada orang-orang tertentu/ pemegang jabatan khusus seperti *the Roman Tribune* (majelis Roma). Lebih lanjut ia berpendapat bahwa:<sup>21</sup>

“Pemerintah sipil, sepanjang kita hidup di dunia ini, dirancang untuk menggembarakan dan menopang pemujaan eksternal terhadap Tuhan, untuk menjaga kemurnian doktrin agama, untuk mempertahankan konstitusi gereja, untuk membentuk perilaku kita menuju keadilan sipil, untuk meningkatkan kerja sama antar manusia, dan membangun perdamaian dan ketentraman umum.

### **Amanat Alkitab tentang Peran Orang Krsiten**

Peran orang Kristen ditengah-tengah dunia dapat terlihat dari pengutusan Yesus kepada 12 murid-Nya (Matius 10: 5-15), yaitu untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Jika ditinjau lebih jauh lagi, seperti apa yang tertulis di dalam Yeremia 29: 7, maka orang Kristen juga harus turut berperan dalam pembangunan kesejahteraan kota di mana ia berada. Salah satu pembangunan kota adalah dengan membayar pajak, seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 22: 21. Sisi lain dalam pembangunan kota ialah mencerdaskan masyarakat kota tersebut untuk melakukan apa yang benar, seperti yang diungkapkan Yesus dalam amanat agung, “...ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu...” (Matius 28: 19-20).

Jadi dapat disimpulkan, bahwa peran orang Kristen di tengah-tengah dunia ini adalah: Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, mengusahakan pembangunan kesejahteraan kota di mana ia tinggal dengan cara: Membayar pajak dan turut mencerdaskan masyarakat kota lewat pendidikan yang berdasar pada takut akan Tuhan.

---

<sup>20</sup> Ibid., hal. 232

<sup>21</sup> Ibid., hal. 237-240.

Tentulah untuk menjalankan peran tersebut di tengah-tengah dunia, orang Kristen harus mengerti keadaan social politik yang terjadi di tengah-tengah kota atau negara di mana ia tinggal. Artinya seorang Kristen harus ikut terlibat aktif dalam perpolitikan bangsa, bukan hanya sekedar partisipasi politik (Partisipasi politik = hanya ikut serta dalam pencoblosan). Dengan demikian orang Kristen dapat mengambil peran yang tepat, bijaksana dan benar di tengah-tengah kota atau negara di mana ia berada. Bila orang Kristen tidak mau ikut berperan maka orang Kristen akan dapat terjebak menjadi orang yang autis (asik dengan dirinya sendiri, membangun menara gading) jika berlebihan untuk mengatakan anti sosial atau sama seperti yang dikatakan Aristotle “*but he who is unable to live in society, or who has no need because he is sufficient for him self, must be either a beast or a god; he is no part of state,*”<sup>22</sup> (bahwa barangsiapa yang tidak mampu hidup dalam masyarakat, atau tidak butuh karena mampu mencukupi dirinya, jika bukan seekor binatang berarti ia dewa.)

Di tengah-tengah kondisi ekonomi, social, hukum dan politik Indonesia yang demikian (Indonesia negara gagal- lihat di atas), peran apakah yang dapat dilakukan orang Kristen, agar dapat berfungsi sebagai garam dan terang? Beberapa usulan di bawah ini patut dipikirkan dan dipertimbangkan, yaitu:

1. Orang Kristen harus terlibat aktif berpolitik, sebab politik itu tidak kotor. Justru dengan aktifnya orang Kristen berpolitik, akan memunculkan orang-orang *Man the moral Agent* di masyarakat dan meredusir manusia yang berjenis *Man the animal* dan *Man the substance*.
2. Sebagai manusia yang berjenis *man the moral Agent* seharusnya orang Kristen banyak duduk di parlemen, agar dapat mengeluarkan sistem yang baik dan dapat mereduksi korupsi yang terjadi.
3. Gereja dan sekolah-sekolah tinggi Kristen sebagai tempat memproduksi pemimpin-pemimpin Kristen, jangan lagi hanya memproduksi pemimpin yang berpengaruh atau pemimpin moral/ etis, tetapi Gereja harus memproduksi pemimpin yang mampu melakukan perbuatan perbuatan atau tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat secara konkret.

---

<sup>22</sup> Aristotle, *On Man in The Universe: Politics I.2.*, (America: Walter J. Black, 1943), 252.

4. Orang Kristen harus turut mencerdaskan masyarakat setempat dengan membuka sekolah-sekolah yang dapat dijangkau oleh masyarakat bawah. Atau membuka tempat-tempat kursus gratis bagi masyarakat miskin.
5. Orang Kristen harus membayar pajak sebagaimana mestinya, agar melalui pajak pemerintah dapat memiliki dana untuk memajukan masyarakatnya.
6. Orang Kristen dapat melakukan pelayanan pengobatan gratis, sebagai perwujudan untuk menyembuhkan orang sakit.

### PENUTUP

Sebagai orang Kristen marilah berperan aktif dalam politik untuk meredusir manusia jenis *Man the animal* dan *Man the substance* dan memunculkan lebih banyak lagi di parlemen dan di masyarakat manusia berjenis *Man the moral Agent* atau *manusia ciptaan baru*, yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan.

Lembaga gereja dan sekolah-sekolah tinggi Kristen sudah seharusnya memproduksi pemimpin-pemimpin yang memiliki kualitas seperti yang dikehendaki Yesus. Agar banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh partai-partai politik untuk memilih pemimpin pada level legislatif (DPR), pada level pemerintah daerah (camat, bupati/ walikota, gubernur), dan pada level setingkat menteri, sehingga dapat mereduksi pemimpin-pemimpin yang tidak sepatasnya duduk ditingkat diparlemen, kepala daerah, dan menteri.

---

ARIPIN TAMBUNAN menyelesaikan pendidikan teologi dari Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus (S.Th.); HITS Semarang (M.A.) dan saat ini sedang studi untuk program Magister Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Bandung (STTB). Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Ekstensi D3 dan Ketua Program S1 Christian Leadership di STT INTI Bandung